

**PELAYANAN PEMERINTAH KOTA DEPOK DALAM MENERBITKAN  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)  
TAHUN 2012-2014**

**SURAHMAN**  
**Magister Ilmu Administrasi Universitas Nasional**

**ABSTRAK**

Fungsi pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah merupakan suatu yang mutlak untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, hal ini menjadi kunci penting dalam menata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan prinsip dasar yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, kiranya menjadi dasar dalam mengambil suatu kebijakan pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah harus dapat melibatkan langsung masyarakat mulai dari perencanaan, pengelolaan dan pengawasan, dengan melibat masyarakat memudahkan tercapainya tujuan dari desentralisasi itu sendiri. Pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan citra pelayanan yang prima dan handal dengan membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), sebagai motor penggerak perizinan bagian dari organisasi publik harusnya mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dalam arti mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan tanggap terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang bisa berbentuk tuntutan, kebutuhan dan harapan masyarakat. Sumber data berasal dari informan dengan dasar penguasaan masalah yang tetap. Hasil penelitian membuktikan bahwa pelayanan pemerintah Kota Depok dalam menerbitkan IMB rumah tinggal pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) belum berjalan maksimal, indikatornya semangat masyarakat untuk membuat IMB masih sangat rendah, masih banyak kendala dalam proses penyelenggaraannya dan masih adanya oknum petugas yang mengambil kesempatan dengan menerima upah pembuatan gambar bangunan/proses IPR hal tersebut dikarenakan ketidakfahaman masyarakat dan keinginan masyarakat sendiri agar dapat selesai lebih cepat.

*Service function in the governance of an area is an absolute must to empower the community, it is becoming an important key in managing good governance (good governance) with the basic principles of effective, efficient, transparent and accountable, would be the basis for taking a policy community development, local governments should be able to involve the public directly from the planning, management and supervision, the public wrapped facilitate the attainment of the objectives of decentralization itself. The research proves that government services Depok in issuing IMB residence on Investment Board and Licensing Services (BPMP2T) not running optimally, the indicator community spirit to make the IMB is still very low, there are still many obstacles in the process of implementation and the persistence of rogue officers take the opportunity to receive a reward of making pictures of the building / process IPR misunderstanding in this case because the community and the community's own desire to be completed more quickly. Hospitality, care and concern public service workers is becoming very important to note. Attendant care and concern that can be proved with a firm stand indiscriminately or not selective to the rules that apply in this case is the maintenance of IMB in BPMP2T Depok.*



*In addition, the chain of bureaucracy that must be passed by the community in the management of IMB extremely consume energy and time. With these conditions, then according to the authors of these factors also contribute less orderly IMB services at the field level.*

**Keywords:** IMB

